

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Teknologi yang kini mengalami perkembangan yang semakin pesat dan maju (Rahmansyah & Darwis, 2020), di mana sudah banyak masyarakat yang mulai beralih menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Teknologi yang berkembang dengan pesat ini membantu masyarakat untuk dapat mengakses informasi dengan lebih efisien dan efektif. Perkembangan teknologi informasi tentunya memberikan banyak perubahan, yang awalnya kegiatan dilakukan secara manual sekarang bisa dilakukan secara *online* melalui sistem (Yanti & Musmini, 2020). Perkembangan teknologi tersebut tentunya dimanfaatkan oleh industri pada sektor publik sehingga proses pemberian layanan publik dapat terbantu.

Organisasi di sektor publik adalah organisasi yang tidak memprioritaskan perolehan laba dan lebih berfokus pada upaya dalam melayani masyarakat umum (Mumpuni & Widajantie, 2021). Kemajuan teknologi ini tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Adanya teknologi informasi ini tentunya sangat membantu organisasi sektor publik, khususnya di sektor pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi laporan keuangan yang baik (Purnamawati & Hatane, 2020). Salah satu organisasi yang tentunya juga memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng.

BPKPD Kabupaten Buleleng merupakan entitas sektor publik yang dipercaya untuk membantu Bupati dalam memfasilitasi kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi dasar pembentukan BPKPD (BPKPD Kabupaten Buleleng, n.d). Pada BPKPD Kabupaten Buleleng terdapat beberapa pelayanan yang diberikan, di mana rekonsiliasi rekening keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu layanan yang ditawarkan pada bidang akuntansi dan pelaporan. Pelayanan ini nantinya akan menghasilkan berita acara rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijamin keabsahannya. Rekonsiliasi mempunyai peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang harus dilakukan pemerintah agar dapat menghasilkan laporan yang bertanggung jawab secara keuangan serta meminimalisasi adanya perbedaan dalam pencatatan laporan keuangan (Kemenkeu KPPN Benteng, 2021). Hal ini tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

BPKPD Kabupaten Buleleng memanfaatkan kemajuan teknologi berupa sistem informasi atau alat bantu pengelolaan keuangan daerah yang biasanya disebut dengan sistem informasi yang sudah terkomputerisasi dalam melaksanakan kewajiban untuk melayani masyarakat, yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah telah mengatur hal ini. Dengan memanfaatkan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi ini tentunya digunakan untuk membantu pemerintah dalam proses pengelolaan data sehingga penghimpunan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan efektif, dan akhirnya

diperoleh laporan keuangan dengan kualitas maksimal dan mengkomunikasikan fakta keuangan yang akurat (Purnamawati & Hatane, 2020).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah salah satu perangkat lunak berupa *website* yang mulai digunakan di beberapa organisasi pemerintahan salah satunya di BPKPD Kabupaten Buleleng. Pada aplikasi tersebut sudah terdapat informasi yang dibutuhkan oleh BPKPD yang nantinya akan digunakan dalam pelayanan yang diberikan terutama dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD. Selain terdapat informasi yang dibutuhkan oleh BPKPD, aplikasi tersebut juga digunakan untuk mengolah data pemerintah daerah, di mana setelah data diolah sedemikian rupa sesuai dengan keperluan, maka akan disajikan berupa suatu informasi terkait jasa keuangan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, seperti SKPD atau masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang berjalan namun kurang sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Sari, 2022), baik itu pada saat pengelolaan, pengoperasian sistem ataupun capaian dari *output* yang nantinya dihasilkan dari sistem informasi yang digunakan. Di mana, hal tersebut dapat menyebabkan efektivitas dari penggunaan SIPD berkurang, apalagi SIPD di BPKPD Kabupaten Buleleng baru diterapkan di tahun 2022. Maka dari itu, peneliti menduga adanya fenomena dalam penerapan SIPD pada pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yaitu adanya salah input data serta kurangnya beberapa fitur pada SIPD seperti dalam penyusunan LRA, yang mana menyebabkan saat dilakukannya proses rekonsiliasi laporan keuangan terdapat perbedaan dikarenakan salah input yang dilakukan. Terjadinya salah input ini juga disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman akan penggunaan sistem informasi dikarenakan aplikasi SIPD terbilang

baru diterapkan di beberapa organisasi pemerintahan di Indonesia pada tahun 2020 yang diawali dengan merumuskan APBD untuk anggaran pada tahun 2021 (Fahzura & Najamudin, 2022).

Fenomena yang tersebut juga selaras dengan temuan yang diperoleh oleh Vitriana dkk. (2022) yang mengungkapkan bahwa ditemukan adanya ketidakefektifan implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru saat menyajikan informasi yang berkaitan dengan upaya mengelola dana daerah. Sejalan dengan temuan tersebut, begitupula dengan hasil yang diperoleh oleh Tumija dkk. (2023) yang mengungkapkan bahwa ditemukan beberapa hambatan yang terjadi dari penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang, yaitu pelatihan yang diberikan dari pemerintah pusat belum optimal, server yang masih kurang akurat, serta menu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan khususnya pada laporan realisasi anggaran sudah ada tetapi belum *balance*, belum bisa diakses dan juga pada pengembalian LS kas umum belum sesuai.

Di sisi lain, penerapan SIPD dapat menghasilkan informasi data yang lebih cepat dan baik dari segi waktu, menurut hasil penelitian Balqis & Fadhly (2021). Berdasarkan analisis mutu, penerapan SIPD dinilai meraih hasil yang memuaskan, meskipun sejumlah pengguna yang dipersentasekan sebesar 60–70% cenderung belum begitu paham bagaimana proses penyampaian data. Selain itu, dari sudut pandang waktu, penerapan SIPD menghasilkan data yang lebih baik yang diperoleh Distanaker.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berminat untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai pengimplementasian SIPD pada pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD di BPKPD agar diperoleh gambaran mengenai apakah SIPD yang

diterapkan oleh BPKPD Kabupaten Buleleng ini sudah berjalan dengan efektif atau tidak, hambatan dalam penerapan SIPD dalam melaksanakan pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD tersebut, serta solusi untuk mengatasi hambatan dalam penerapan SIPD. Maka dari itu penulis mengangkat judul sebagai berikut: “Penerapan, Hambatan, dan Solusi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD di BPKPD Kabupaten Buleleng”.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Mengacu pada latar belakang, penulis menentukan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Aplikasi SIPD yang baru diterapkan di BPKPD Kabupaten Buleleng pada tahun 2022.
2. Kurangnya pemahaman dari sumber daya manusia dalam pengoperasian aplikasi SIPD serta masih kurangnya beberapa fitur dalam SIPD.

## **1.3 Pembatasan Masalah Penelitian**

Untuk menghindari adanya berbagai penafsiran yang berbeda, maka penulis membuat batasan permasalahan yang hendak ditelaah pada pengkajian ini, yaitu penerapan SIPD khususnya pada pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dan kendala serta juga solusi yang diambil oleh BPKPD dalam menghadapi hambatan pada penerapan SIPD, sehingga nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan SKPD yang dapat dijamin keabsahannya.

#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang, maka pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan SIPD pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD di Kantor BPKPD Kabupaten Buleleng?
2. Apa hambatan dalam penerapan SIPD saat melaksanakan pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD di Kantor BPKPD Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan dalam penerapan SIPD utamanya dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD di Kantor BPKPD Kabupaten Buleleng?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang mengacu pada rumusan yang telah diuraikan, yaitu:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan SIPD dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD di BPKPD Kabupaten Buleleng.
2. Agar dapat memahami apa saja tantangan yang dihadapi oleh pihak BPKPD Kabupaten Buleleng dalam penerapan SIPD pada pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang diambil oleh pihak BPKPD Kabupaten Buleleng untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam penerapan SIPD pada pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD.

## **1.6 Manfaat Masalah Penelitian**

Penulis dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya diharapkan dapat memperoleh manfaat positif dari temuan penelitian ini, yakni.

### **1.6.1 Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diyakini akan memberikan lebih banyak wawasan baru pada mahasiswa, khususnya dalam hal penggunaan SIPD dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD pada BPKPD Kabupaten Buleleng serta dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori dalam perkuliahan.

### **1.6.2 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha**

Maksud dilaksanakannya penelitian adalah supaya dapat dijadikan pedoman oleh pihak atau lembaga yang membutuhkan informasi terkait bidang tersebut, khususnya yang berniat melakukan penelitian serupa. Kemudian, juga diharapkan memberikan tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan penerapan SIPD dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD pada BPKPD Kabupaten Buleleng.

### **1.6.3 Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng**

BPKPD Kabupaten Buleleng dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi agar nantinya dapat dilakukan perubahan dan perbaikan dalam menghadapi hambatan yang dialami dan dapat mengoptimalkan penerapan SIPD dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD.